

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN KETERBATASAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peraturan dan kualitas peraturan berpengaruh positif terhadap persepsi keberhasilan pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Brebes.
2. Peraturan dan kualitas peraturan tidak berpengaruh terhadap persepsi keberhasilan pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Brebes setelah dimoderasi oleh kompetensi DPPK.
3. Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi berpengaruh negatif terhadap persepsi keberhasilan pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Brebes.
4. Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi tidak berpengaruh terhadap persepsi keberhasilan pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Brebes setelah dimoderasi oleh kompetensi DPPK.
5. Kompetensi teknis dan manajerial pegawai berpengaruh positif terhadap persepsi keberhasilan pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Brebes.
6. Kompetensi teknis dan manajerial pegawai berpengaruh negatif terhadap persepsi keberhasilan pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Brebes setelah dimoderasi oleh kompetensi DPPK.

7. Kapasitas organisasi/struktur organisasi dan sistem manajerial tidak berpengaruh terhadap persepsi keberhasilan pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Brebes.
8. Kapasitas organisasi/struktur organisasi dan sistem manajerial tidak berpengaruh terhadap persepsi keberhasilan pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Brebes setelah dimoderasi oleh kompetensi DPPK.
9. Teknologi informasi berpengaruh positif terhadap persepsi keberhasilan pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Brebes.
10. Teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap persepsi keberhasilan pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Brebes setelah dimoderasi oleh kompetensi DPPK.

## B. Implikasi

Temuan empiris penelitian ini memberikan implikasi praktik dan teoririk. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada SKPD dapat meningkatkan tata kelola keuangan negara, produktivitas kinerja, penghematan biaya dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Baiknya penerapan prinsip-prinsip *good governance* oleh SKPD dapat dijadikan prediksi bahwa SKPD yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance*

dalam mengelola dana APBD dapat meningkatkan trasparansi, akuntabilitas dan kepercayaan publik. Lebih jauh, pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dapat berjalan dengan baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Implikasi teoritik, permasalahan keagenan tidak hanya terjadi pada sektor swasta tetapi juga pemerintahan. Khususnya pada saat penyusunan dan pelaksanaan anggaran, ketika terjadi asimetri informasi, SKPD dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat (perencanaan program yang buruk, konsumsi berlebihan, nepotisme, dan korupsi). Selain itu, penelitian ini bermanfaat bagi pengetahuan bidang ilmu akuntansi khususnya sektor publik (*public budgeting*) dan mendorong riset akuntansi sektor publik lebih lanjut terutama yang berhubungan dengan *good governance* dan pengelolaan anggaran berbasis kinerja di sektor publik.

### C. Keterbatasan dan Peluang Penelitian Mendatang

Penelitian ini memfokuskan pada penerapan prinsip-prinsip *good governance*, kompetensi DPPK dan persepsi keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja yang hanya melibatkan 63 SKPD di Kabupaten Brebes. Penelitian inipun dibatasi pada responden SKPD yang menjabat sebagai bendahara pengeluaran. Sehingga hasil penelitian ini belum bisa digeneralisasi untuk semua SKPD di seluruh Indonesia. Selain itu, penelitian ini menggunakan data primer melalui survey, sehingga pilihan responden belum benar-benar mencerminkan jawaban sebenarnya.

Diharapkan penelitian mendatang melibatkan lebih banyak responden dari SKPD dilingkup yang lebih luas, sehingga hasil penelitian yang dihasilkan lebih komprehensif. Selanjutnya, penelitian mendatang tidak hanya dilakukan dengan survey (kuesioner) tetapi juga wawancara kepada responden. Dengan demikian, dapat mengetahui alasan responden memilih jawaban terhadap kuesioner yang diberikan, sehingga jawaban yang diberikan mencerminkan jawaban responden yang sebenarnya.

